



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Agustus 2012

Halaman: 4

PNS Dilarang Terima Parsel

YOGYA (MERAPI) - Sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima parsel Lebaran. Pemkot Yogyakarta sendiri sudah menerima surat imbauan dari KPK itu dan akan memprosesnya dalam surat edaran ke semua instansi.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, R Titik Sulastri mengatakan, surat dari KPK diterima Selasa (7/8) lalu. Kini, surat sudah diteruskan ke Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta untuk diproses dalam surat edaran. "Dalam waktu dekat, surat larangan penerimaan parsel bagi PNS ini akan diedarkan. Tidak ada kategorinya. Besar atau kecil tetap dilarang," kata Titik Rabu (8/8).

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga meminta PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang menerima parsel harus dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini untuk menghindari gratifikasi. "Kalau tidak boleh menerima ya jangan sampai menerima. Apa yang sudah ada di aturan, harus ditaati," tambahnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat mengaku siap melakukan pengawasan. Tidak hanya fokus pada parsel lebaran tapi juga indikasi tindakan korupsi atau gratifikasi dalam pemberian tersebut. "Jika terbukti sebagai gratifikasi, akan ditelusuri lebih lanjut. Kalau atasan yang memberi tali asih kepada bawahannya ataupun keluarga itu bukan gratifikasi," ucapnya.

Pada bagian lain, Bupati Gunungkidul Hj Badingah S Sos juga melarang pemberian parsel atau bingkisan bagi pejabat menjelang Lebaran. Pemkab juga melarang mobil dinas dipakai untuk mudik.

"Pemkab akan mengandangkan mobil dinas agar tidak dipergunakan mudik jelang Lebaran," ujarnya.

(Tri/Pur)-a

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Inspektorat | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 20 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005